

| KORAN
DIGITAL

PERTAMA
& GRATIS

KORAN SULSEL

TERPERCAYA & TERDEPAN **.COM**

| EDISI SENIN
1 SEPTEMBER 2025



WALI KOTA MUNAFRI GAUNGKAN GERAKAN #JAGAMAKASSARTA, TOLAK AKSI ANARKIS



Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin serukan jaga MakassarTa kepada masyarakat Kota Makassar terhadap aksi demonstrasi anarki di Kota Makassar, Minggu (31/08/2025).

WALI KOTA MUNAFRI GAUNGKAN GERAKAN #JAGAMAKASSARTA, TOLAK AKSI ANARKIS

MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyerukan gerakan #JagaMakassarTa sebagai bentuk penolakan terhadap aksi anarkis yang mewarnai demonstrasi beberapa hari terakhir.

“Seruan ini bukan sekadar slogan, tetapi ajakan tulus agar seluruh warga bersatu menjaga kota tercinta tetap aman dan damai,” ujar Munafri di Makassar, Minggu (31/8).

Ia menjelaskan, istilah #JagaMakassarTa lahir sebagai ajakan sederhana namun penuh makna: menjaga kota bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan rumah besar bagi jutaan orang yang mencari nafkah, membina keluarga, dan menaruh harapan masa depan.

Munafri menekankan, keamanan kota bukan hanya tugas

aparat atau pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh warga. “Menjaga Makassar berarti menjaga saudara, tetangga, sahabat, dan anak cucu kita sendiri,” ucapnya.

Gerakan ini, lanjutnya, mengingatkan masyarakat untuk menolak anarkisme, menghindari perpecahan, dan memilih jalan damai dalam menyuarakan aspirasi. Menurutnya, Makassar yang damai adalah Makassar yang memberi kehidupan, bukan kehilangan.

Appi—sapaan akrab Munafri—mengajak semua lapisan masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, ormas, hingga tokoh masyarakat, untuk ikut serta dalam gerakan #JagaMakassarTa. “Tagar ini bukan hanya slogan, tapi wujud nyata cinta kita pada Makassar. Kita ingin kota ini tetap

damai, aman, dan menjadi rumah yang membanggakan bagi semua warganya,” tegasnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Kolonel Inf Franki Susanto, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta perwakilan KNPI, Cipayung, ormas kekaryaan, organisasi kemahasiswaan, hingga kelompok keagamaan.

Munafri menutup seruannya dengan mengingatkan para lurah, camat, hingga RT/RW agar berperan aktif menjaga warganya, khususnya generasi muda, supaya tidak terjebak dalam aksi anarkis. (ant/KS)

WALI KOTA MAKASSAR IMBAU UNJUK RASA TANPA ANARKI

MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan agar aksi unjuk rasa lanjutan atas berbagai persoalan bangsa dilakukan sesuai aturan dan terbebas dari tindakan anarkis.

“Penyampaian pendapat dijamin konstitusi, tapi harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kita semua ingin menjaga agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti kemarin,” ujarnya dalam dialog bersama perwakilan organisasi masyarakat dan kepemudaan di Makassar, Ahad (31/8) malam.

Pertemuan yang diikuti organisasi mahasiswa, kepemudaan, masyarakat, hingga kelompok keagamaan itu bertujuan

menyamakan pandangan agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung damai. Munafri menekankan bahwa demonstrasi tidak boleh keluar jalur dan harus menjadi sarana aspirasi, bukan pemicu kerusuhan.

Ia menyesalkan kerusuhan yang berujung pada pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel serta penjaraan barang-barang milik negara dan pribadi warga. “Paling menyedihkan ada korban jiwa, lalu terjadi penjarahan. Itu jelas bukan cara kita berdemokrasi,” tegasnya.

Munafri juga meminta agar mahasiswa dan masyarakat tidak mudah ditunggangi pihak-pihak yang ingin memperkeruh

keadaan. Menurutnya, ruang penyampaian aspirasi harus dijaga agar tetap murni, tidak disalahgunakan.

Dialog tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar, Dandim 1408/Makassar, Sekda Pemkot Makassar, perwakilan Kejaksaan Negeri, Satpol PP, ormas, hingga kelompok suporter sepak bola.

Sebelumnya, aksi demonstrasi pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari berujung kerusuhan. BPBD mencatat empat orang meninggal dunia dari total 11 korban. Tiga korban ditemukan di Kantor DPRD Makassar, sementara satu orang lainnya meninggal di lokasi berbeda. Tujuh orang lain mengalami luka-luka. (ant/KS)



Suasana pertemuan antara perwakilan organisasi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Warung Kopi Jalan Sawerigading Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8) malam. (ANTARA)



KAPOLRESTABES MAKASSAR: UNJUK RASA DIKAWAL, ANARKIS DITINDAK TEGAS

MAKASSAR – Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menegaskan bahwa kepolisian siap mengawal setiap aksi unjuk rasa mahasiswa maupun organisasi masyarakat di Makassar selama berjalan sesuai aturan hukum.

“Unjuk rasa dijamin undang-undang dan akan kita kawal. Tetapi ketika sudah beralih menjadi pelemparan, penganiayaan, pembakaran, itu bukan lagi unjuk rasa, melainkan tindak pidana. Maka harus ditindak,” ujarnya usai pertemuan dengan perwakilan ormas dan OKP di Jalan Sawerigading, Minggu (31/8) malam.

Arya menambahkan, arahan Presiden Prabowo Subianto yang diterjemahkan Kapolri dan Panglima TNI menekankan perlunya langkah tegas, namun melalui tahapan yang jelas dan ter dokumentasi. “Kalau situasi rusuh mencapai tahap kritis, tindakan tegas bisa dilakukan, mulai dari peluru karet hingga peluru tembak, bila diperlukan. Tujuannya justru menghindari jatuhnya kor-

ban jiwa seperti pada kerusuhan Jumat lalu,” tegasnya.

Mengenai pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan Kantor DPRD Provinsi Sulsel pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari, Arya memastikan pihaknya sedang memburu para pelaku. “Itu massa dalam jumlah besar. Kami anggap pelanggaran hukum. Identitas pelaku akan dicari, baik melalui CCTV maupun metode identifikasi lainnya. Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Sesuai arahan Kapolri, kami berniat menuntaskannya,” jelasnya.

Terkait pola pengamanan aksi lanjutan, ia menegaskan seluruh elemen akan dilibatkan. “Kami bersama Wali Kota, Forkopimda, dan masyarakat akan mengawal. Kita melawan anarkisme. Jumlah massa besar bukan masalah, tapi kalau keluar dari aturan, tindakan tegas sesuai prosedur akan diambil,” ucapnya.

Arya juga memberi penjelasan soal absennya polisi saat kerusuhan DPRD Makassar. Menurutnya, jumlah personel yang hanya 200

orang tidak mampu membendung massa. Selain itu, aparat kala itu tidak dilengkapi senjata, sesuai komitmen Kapolri agar pengunjuk rasa tidak disakiti. “Namun melihat eskalasi meningkat, kami tarik pasukan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak,” katanya.

Ia menambahkan, saat personel ditarik dari DPRD Sulsel dan diarahkan ke bawah jembatan layang Pos Lantas, massa mulai melempari batu dan bom molotov. Polisi kemudian memilih bertahan di sekitar dealer Toyota di Jalan Urip Sumoharjo.

Selain faktor jumlah, Arya menyebut beredar kabar adanya razia oleh kelompok mahasiswa yang menargetkan anggota Polri. Bahkan diduga ada kelompok tertentu yang sengaja memburu polisi untuk dikeroyok. “Kami tidak bisa mengambil risiko itu, sehingga meminta bantuan TNI. Namun ketika TNI bergerak, mereka juga dihadang massa di depan Kampus UMI, UNM, dan beberapa titik lain sehingga sulit masuk,” pungkasnya. (ant/KS)

PEMPROV SULSEL TERAPKAN BELAJAR DARING 1-4 SEPTEMBER, ANTISIPASI DAMPAK DEMONSTRASI

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengimbau seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/MA sederajat hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta, melaksanakan pembelajaran secara daring pada 1-4 September 2025.

Kebijakan ini dituangkan dalam surat imbauan tertanggal 31 Agustus 2025 sebagai langkah antisipasi atas gejolak demonstrasi yang melanda Kota Makassar dan sejumlah daerah di Sulsel beberapa hari terakhir. "Pimpinan perguruan tinggi dan kepala satuan pendidikan

tetap memantau serta memastikan pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran daring berjalan optimal, menjaga situasi aman dan kondusif," demikian salah satu poin dalam surat edaran Pemprov Sulsel.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga mengeluarkan surat edaran bernomor 400.3.5/8/S. Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangi Kepala Disdik Achi Soleman. Dalam edaran itu ditegaskan bahwa seluruh jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, wajib melaksanakan pembelajaran daring

selama periode 1-4 September. "Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya," tertulis dalam edaran resmi Disdik Makassar, Minggu (31/8).

Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi potensi risiko keamanan di sekitar sekolah dan kampus menyusul kerusuhan yang berujung pada pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel, serta menewaskan empat orang. (ant/KS)



Suasana Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025).



GENERASI MUDA GOWA ANGKAT TARI SULAPA' APPA SEBAGAI PESAN DAMAI

GOWA – Generasi muda Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menampilkan Tari Sulapa' Appa sebagai simbol pesan moral dan ajakan menjaga keda-maian di tengah maraknya aksi anarkis belakangan ini.

Ketua Panitia, Basir, menegaskan bahwa pertunjukan tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi sarat makna filosofis Bugis-Makassar. "Tarian ini membawa pesan moril untuk mencegah maraknya aksi anarkisme yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Makassar," ujarnya, Minggu (31/8).

Tari Sulapa' Appa mengangkat

filosofi empat unsur kehidupan—tanah, air, api, dan angin—yang diyakini sebagai pedoman masyarakat Bugis-Makassar dalam menjaga keseimbangan hidup. Melalui gerakan para penari, tersampaikan pesan bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial harus dijaga agar tidak menimbulkan marabahaya maupun konflik.

Menurut Basir, kegiatan ini menjadi refleksi generasi muda terhadap kondisi sosial yang rawan provokasi dan rentan berujung pada tindakan destruktif. "Kami ingin menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi benteng moral bagi generasi muda agar

tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan," tegasnya.

Salah satu penari, Ainun Qanisah Rahmah, mengaku bangga bisa terlibat dalam pertunjukan tersebut. Ia menilai seni tari bukan hanya melestarikan budaya leluhur, tetapi juga menjadi media untuk mengajak masyarakat menjaga kerukunan.

Melalui pertunjukan ini, masyarakat Desa Pakatto ingin menegaskan bahwa seni dan budaya dapat menjadi solusi alternatif dalam membangun kesadaran bersama, memperkuat persatuan, sekaligus menangkal potensi anarkisme di tengah kehidupan sosial. (ant/KS)

MASJID AL MARKAZ GELAR DOA DAN ZIKIR BERSAMA, AJAK BANGSA BERMUHASABAH

MAKASSAR – Masjid Al Markaz Al Islami di Kota Makassar menggelar doa dan zikir bersama pada Minggu malam (31/8), sebagai upaya menenangkan masyarakat di tengah kegelisahan pascademonstrasi destruktif yang menimbulkan korban jiwa.

Sekretaris Umum Al Markaz Al Islami, Arman Arfah, mengatakan kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat dan tokoh agama sebagai ruang perenungan bersama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Doa dan dzikir ini bukan sekadar seremoni, tetapi mo-

mentum refleksi agar kita semua berpikir jernih demi keselamatan dan persatuan bangsa," ujarnya.

Arman menegaskan, muhasabah diperlukan bukan hanya untuk merespons insiden yang terjadi, tetapi juga sebagai evaluasi atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menimbulkan keresahan masyarakat. "Kami ingin mengajak seluruh elemen bangsa duduk bersama, mengedepankan akal sehat, dan membuka hati. Baik pemerintah maupun masyarakat, semua perlu melakukan evaluasi diri," katanya.

Acara doa bersama ini terbuka untuk semua kalangan, tanpa membedakan latar belakang politik maupun organisasi. Tokoh akademisi, ulama, aktivis, komunitas pemuda, dan mahasiswa turut hadir, menjadikan kegiatan ini simbol kebersamaan dalam memperkuat persatuan.

Panitia menyebutkan inisiatif doa dan zikir bersama ini tidak berhenti di Makassar. Gerakan moral dan spiritual tersebut akan digulirkan ke berbagai daerah sebagai jembatan dialog untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (ant/KS)



GRATIS
TANPA IURAN

E-PAPER

koraNusantara

www.koranusantara.com

EDISI SENIN
1 SEP 2025



PRABOWO PERINTAHKAN TNI-POLRI TINDAK TEGAS PELAKU PENJARAHAN

BACA HALAMAN 2



**EMPAT TERSANGKA
PENYERANGAN MARKAS
BRIMOB CIKEAS DITANGKAP**



Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (tengah), memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Ia menyampaikan berbagai tekanan tentang dinamika akhir-akhir ini di Tanah Air dari Presiden Prabowo yang sebelumnya memimpin rapat kabinet. ANTARA/Fathur Rochman

PRABOWO PERINTAHKAN TNI-POLRI TINDAK TEGAS PELAKU PENJARAHAN

JAKARTA - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat negara.

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman," ujar dia, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Ia mengatakan arahan tersebut merupakan hasil dari Sidang Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sore. Ini adalah rapat

kabinet pertama setelah berbagai demonstrasi terjadi.

Sjamsoeddin menyampaikan, Prabowo menugaskan Kepala Polri, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, dan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar tidak ragu mengambil langkah tegas yang berkaitan dengan keamanan fasilitas yang dimiliki pribadi, pejabat, maupun negara.

"Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum," kata dia.

Presiden, kata dia, juga menekankan pentingnya soliditas dan kerja sama antara kepolisian dan TNI untuk memastikan sta-

bilitas nasional serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam pernyataan pers tersebut, dia didampingi oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Polri, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, Kepala Badan Intelijen Nasional, Herindra, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Diketahui, sejumlah rumah anggota legislator hingga menteri menjadi sasaran penjarahan oleh massa pada Sabtu (30/8), di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Massa menjarah berbagai harta benda hingga makanan dari kediaman para tokoh publik tersebut. (ANT/KN)



Empat tersangka provokasi serangan Mako Brimob Cikeas dihadirkan saat konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

EMPAT TERSANGKA PENYERANGAN MARKAS BRIMOB CIKEAS DITANGKAP

BOGOR - Polres Bogor menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus provokasi penyerangan Markas Brimob Cikeas, setelah sebelumnya mengamankan 17 terduga pelaku dalam operasi pengamanan di Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8) malam.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa empat orang tersebut memiliki peran penting dalam rencana penyerangan yang beredar lewat pamflet provokatif di media sosial sejak siang hingga malam.

"Tersangka M bertindak sebagai provokator sekaligus membawa senjata tajam. Bukti digital dan barang bukti sajam memperkuat perannya dalam kasus ini," kata Wikha dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Minggu (31/8/2025) malam.

Tersangka pertama berinisial M, warga Tangerang Selatan berperan sebagai provokator dan

kedapatan membawa dua senjata tajam. Dari telepon genggamnya, polisi menemukan pamflet digital ajakan menyerang Markas Brimob Cikeas.

Tersangka kedua, AS asal Bogor menyiapkan poster-poster hasutan yang akan ditempelkan di sekitar lokasi Brimob untuk memancing massa. Poster itu diamankan sebagai barang bukti dugaan penghasutan.

Kemudian, RP asal Bogor, ditangkap setelah membawa sebotol bahan bakar Pertamax yang dipersiapkan untuk aksi pembakaran. Polisi menjeratnya dengan pasal percobaan tindak pidana pembakaran.

Adapun BS, tersangka keempat, terbukti menyebarkan pesan provokatif di grup WhatsApp berisi ajakan menyerang dan membunuh aparat. Ia juga menyebarluaskan pamflet digital ke sejumlah pihak.

Keempat tersangka dijerat

beragam pasal, mulai dari Undang-Undang ITE, pasal penghasutan dalam KUHP, hingga Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, dengan ancaman hukuman bervariasi enam hingga 12 tahun penjara.

Sementara 13 orang lain yang turut diamankan masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi menyebut mereka ditangkap dalam kelompok kecil, ada yang berdua, bertiga, maupun berempat.

"Proses pemeriksaan masih berjalan. Kami ingin memetakan jaringan provokasi ini lebih jelas, karena mereka tidak berasal dari satu kelompok tunggal," ujar Kapolres.

Dia menjelaskan pemeriksaan juga mendapat dukungan langsung dari tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turun membantu Polres Bogor dalam pendalaman kasus tersebut. (ANT/KN)

PRABOWO BATAL HADIRI KTT SCO, MENLU SUGIONO SERAHKAN SURAT KE WANG YI

TIANJIN - Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden," kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemandirian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

Sebelumnya Kementerian



Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemimpin lainnya.

Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau (observer) yaitu

Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan "SCO Plus" yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

Tema SCO tahun ini adalah "Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO". Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan koneksi.



Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berjalan ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas akan dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

HARI INI, KPK KEMBALI PERIKSA EKS MENAG YAQUT TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI HAJI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Semoga yang bersangkutan hadir," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu seperti dikutip dari ANTARA dari Jakarta, Senin (1/9/2025) pagi.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya

juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

NASDEM NONAKTIFKAN AHMAD SAHRONI DAN NAFA URBACH DARI DPR RI

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem setelah mencermati dinamika yang terjadi saat ini.

Surat keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu diteken Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Dengan keputusan itu, Sahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025.

“Bahaha sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menggaskan bahwa Partai NasDem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpan-

gan terhadap perjuangan Partai NasDem.

“Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” kata Hermawi.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Selain itu, rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pun dirusak dan dijarah oleh massa. (ANT/ KN)



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

WAPRES GIBRAN TEMUI PENGEMUDI OJOL DI ISTANA

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025) siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.

Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol dalam meja bundar.

Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu.

Gibran pun tampak menanggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang

disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.

Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan salah satu pengemudi ojol.

Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendengarkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator

yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," katanya.

Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (ANT/KN)



Aktivitas jual beli BBM di salah satu SPBU di Bali, Senin (23/6/2025) (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga)

PERTAMINA UMUMKAN PENURUNAN HARGA BBM NONSUBSIDI MULAI 1 SEPTEMBER 2025

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 September 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamina Dex dan Dexlite mengalami penurunan harga.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Minggu, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum.

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM

jenis Dexlite (CN 51) mengalami penurunan menjadi Rp13.600 per liter dari Rp13.850 per liter.

Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp13.850 per liter, dari sebelumnya Rp14.150 per liter.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) terpantau stabil di angka Rp12.200 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang stabil di angka Rp13.000 per liter.

Harga Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp13.100 per liter, dari sebelumnya Rp13.200 per liter.

Sedangkan, sejumlah BBM penugasan dan subsidi tidak

mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. (ANT/KN)



Suasana pembukaan Harganas ke-32 di Kukar (Ady/MKG)

TUAN RUMAH HARGANAS KE-32, KUKAR FOKUS PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

TENGGARONG – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 yang digelar di Kutai Kartanegara (Kukar), tak sekadar seremonial. Acara yang dipusatkan di Taman Eks Tanjung, Tenggarong, Sabtu (30/8/2025), menjadi ruang untuk menegaskan pentingnya keluarga sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr Nurizky Permanajati, menegaskan Harganas bukan hanya tentang memperingati hari keluarga, tetapi juga wadah penguatan ekonomi keluarga. Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), BKKBN mendorong masyarakat agar mandiri secara ekonomi sehingga keluarga bisa sejahtera dan anak-anak tumbuh sehat serta cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau ekonominya kuat, keluarga bisa lebih sejahtera, bisa memberikan makanan bergizi, dan anak-anak akan tumbuh sehat, cerdas, serta menjadi generasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” terang Nurizky.

Gelar dagang menjadi salah satu rangkaian utama, menampilkan produk-produk pemberdayaan keluarga dari berbagai daerah. Booth yang diisi

kader menampilkan hasil kreatifitas warga, memperlihatkan bahwa keluarga yang berdaya ekonomi mampu menopang kesejahteraan generasi berikutnya.

Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menyebut agenda Harganas berlangsung dua hari. Selain gelar dagang, hari pertama diramaikan lomba yel-yel, penyuluhan, dan cerdas cermat yang melibatkan masyarakat secara aktif. Hari kedua menjadi puncak acara dengan rangkaian layanan sosial bagi warga.

“Kebetulan tahun ini gilirannya Kukar menjadi tuan rumah pelaksanaan Harganas ke-32. Maka kita mulai dengan gelar dagang dan empat cabang lomba. Besok merupakan puncak acara yang juga dirangkai dengan berbagai kegiatan layanan untuk masyarakat,” jelas Dafip.

Tak berhenti pada kegiatan seremonial, Harganas juga menghadirkan sentuhan nyata melalui agenda sosial. Program bedah rumah di Loa Janan digelar sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dengan pihak ketiga, memperlihatkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, kegiatan temu lansia menjadi perhatian khusus. Menurut Dafip, lansia perlu terus diberdayakan agar tetap produktif, bukan sekadar bergantung

pada keluarga maupun negara. Dengan demikian, keberadaan mereka justru bisa menjadi kekuatan sosial yang memberi teladan bagi generasi muda.

Momentum Harganas ini sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Program-program yang cepat dirasakan manfaatnya diharapkan bisa segera menyentuh warga, sehingga dampak kesejahteraan keluarga lebih nyata.

Lebih jauh, peringatan Harganas ke-32 di Kukar menjadi simbol penting bahwa pembangunan daerah harus berawal dari penguatan keluarga. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia.

Dafip menekankan, keluarga yang sejahtera akan melahirkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat menjadi fondasi kokoh bagi bangsa. Dengan begitu, keberlangsungan pembangunan bisa terjaga hingga generasi mendatang.

“Keluarga adalah fondasi utama bangsa. Kalau keluarga sejahtera, maka masyarakat dan daerah juga akan maju,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Edotor : Muhammad Rafi'i